

SUSTAINABLE DEVELOPMENT DALAM PEMBANGUNAN ISLAM

Muhammad Rafi Siregar, Masrizal, Rifyal Zuhdi Gultom
Universitas Airlangga, Surabaya
E-mail: m.rafisiregar@gmail.com

Abstrak

Sumberdaya ekonomi dalam kapitalis merupakan hal yang dianggap terbatas sehingga keinginan dalam mengeksploitasi dan memberdayakan alam adalah dua hal yang tidak bisa berjalan secara bersama dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi. Islam mengajarkan keseimbangan dalam melihat sumberdaya yang ada. Melanggar penggunaan yang bersifat eksploitatif dan merusak keberlangsungan sumber daya tersebut, sehingga dibutuhkan pertumbuhan yang bersifat sustainable atau berkelanjutan. Dalam ekonomi islam setidaknya ada 5 aspek yang harus diperhatikan dan menjadi sasaran pembangunan dengan memperhatikan Maqashid Syariah : Hifz Dii, Hifz, Nafs, Nafs, Hifz Aql, Hifz Nasl, Hifz Maal yang bertujuan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Bukan hanya alam tetapi juga sumberdaya manusia itu sendiri yang diperhatikan karena menjadi poros pembangunan ekonomi. Dengan memandang pembangunan ekonomi dari sudut pandang islam tentu akan melahirkan cara dan sistem yang berbeda dengan kapitalis, dengan begitu negara negara islam akan mampu melahirkan cara dan sistem pembangunan sendiri dan cocok bagi dirinya tanpa harus berpedoman pada teori pembangunan kapitalis.

Kata kunci: Sustainable Development, Pembangunan Islam

Abstract

Economic resources in the capitalist are things that are considered limited so that the desire to exploit and empower nature are two things that can not work together in order to pursue economic growth. Islam teaches balance in managing existing resources. Prohibited to violate in an exploitative manner and destroy the sustainability of these resources, so that sustainable growth is needed. In Islamic economics there are at least 5 aspects that must be considered and targeted for development by paying attention to Maqashid Sharia: Hifz Dii, Hifz, Nafs, Nafs, Hifz Aql, Hifz Nasl, Hifz Maal which aims for sustainable growth. Not only nature but also human resources themselves are considered because they are the axis of economic development. view economic development from an Islamic point of view will certainly give birth to ways and systems that are different from capitalist, so that Islamic countries will be able

to give birth to methods and systems of development and are suitable for themselves without having to refer to capitalist development theory

Keywords: Sustainable Development, Islamic Development.

PENDAHULUAN

Suatu tantangan besar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah bagaimana membangun ekonominya selaras dengan ideologi agamanya. Negara-negara Islam umumnya tengah menderita keterbelakangan ekonomi secara luar biasa, yaitu tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia, fisik dan alam yang dimilikinya. Akibatnya, kemiskinan, keterbelakangan dan stagnasi ekonomi terjadi di mana-mana.

Meskipun negara itu termasuk kaya sumber daya namun ekonominya kurang berkembang. Standar hidup rata-rata penduduknya masih rendah. Bahkan realitas yang memprihatinkan adalah pembangunan dan eksploitasi sumber daya ekonomi hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja dari masyarakatnya, dikarenakan konsentrasi ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata. Model pembangunan ekonomi yang berkembang secara pesat di dunia Barat tidak ada jaminan akan sukses jika diaplikasikan di dunia Muslim. Hal ini dikarenakan perbedaan kebudayaan, nilai-nilai, pandangan hidup dan ideologi yang berbeda.

Teori dan model pembangunan yang dikembangkan di Barat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sekulerisme, liberalisme dan kapitalisme yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Barat. Sementara dunia Muslim menjadikan agama sebagai variabel utama dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada kesamaan model pembangunan antara apa yang diaplikasikan di dunia Barat dengan dunia Muslim selama tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan utama dari ajaran Islam (Maqashid Syariah).

Pembangunan ekonomi dalam Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara lima masalah pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keterunan dan harta. Setiap individu berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, agar dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran utamanya sebagai khalifah di bumi.

Di sisi lain, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bertindak sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri. Hal ini didasari oleh pandangan dunia Islam yang menempatkan manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan manusia.¹

¹ Ali Rama Dan Makhilani. 2013. Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. Jurnal Dialog Vol. 36, No.1

PEMBAHASAN

Filosofi Ekonomi Pembangunan Islam

Strategi pembangunan dalam desain teori pertumbuhan ekonomi kadang mengalami konflik tujuan yang ingin dicapai, antara tujuan kemakmuran dan keadilan.. Kecenderungan inilah yang selanjutnya memunculkan teori pertumbuhan (*economic growth*), pertumbuhan dengan keadilan (*growth with justice*) dan pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*).

Teori pembangunan adalah faktor-faktor pokok yang mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri. Teori adalah dasar bagi strategi pembangunan.

Teori dan strategi pembangunan tidak berdiri sendiri, dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama oleh pandangan hidup masyarakatnya. Pandangan hidup suatu bangsa memberikan warna arah (perspektif) pada suatu strategi, serta mempengaruhi pilihan teoritis mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.²

Berdasarkan paradigma ekonomi konvensional setidaknya terdapat dua tujuan pokok dari pembangunan ekonomi. Pertama meningkatkan pendapatan riil per kapita. Kedua menegakkan keadilan distribusi pendapatan. Namun jika dilihat fakta di lapangan justru masalah terbesar dalam perekonomian modern ini khususnya di negara-negara berkembang adalah rendahnya pendapatan masyarakat yang selanjutnya diperparah oleh tingkat kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin yang semakin lebar. Perekonomian hanya digerakkan oleh segelintir orang dan tentunya juga dinikmati oleh segelintir orang tersebut. Artinya adalah permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan ekonomi di antara sesama mereka.

Tujuan dan strategi dari suatu sistem ekonomi pada hakekatnya adalah hasil logis dari pandangannya tentang dunia.³ Sebagai contoh misalnya, jika alam semesta termasuk sumber ekonomi di dalamnya terjadi dengan sendirinya, tanpa ada desain dan tujuan utama dari penciptanya, maka manusia akan berkehendak sebebas-bebasnya dan sesuka hatinya dalam mengeksploitasinya. Tujuan hidupnya hanya untuk mencapai keuntungan dan kepuasan maksimum tanpa mempertimbangkan bagaimana merealisasikannya dan dampaknya terhadap pihak lain. Dengan demikian suatu teori yang cocok dan dapat diterima dalam suatu sistem masyarakat dengan pandangan hidup tertentu, belum cocok bagi yang lain.

² Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, hal. 32

³ Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal.

Dalam konteks ini An-Nabhani membedakan antara sistem ekonomi dengan ilmu ekonomi (teori ekonomi). Kedua hal tersebut sama-sama membahas tentang ekonomi, akan tetapi keduanya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Ilmu ekonomi terfokus pada kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik menyangkut memperbanyak maupun pengedarannya. Sementara sistem ekonomi berhubungan dengan tata cara (mekanisme) pendistribusian harta kekayaan.

Sistem ekonomi harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pandangan hidup (*way of life*) tertentu. Di lain pihak, ilmu ekonomi sebagai sains murni, yang tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup tertentu.

Pandangan yang sama pula dikemukakan oleh Baqir Ash-Shadr⁴ (1979) yang membedakan antara ekonomi sebagai sistem dan ekonomi sebagai ilmu. Sebagai sistem, ekonomi mengacu pada cara bagaimana masyarakat mengatur kegiatan ekonominya, ia mengacu pada cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya. Sistem ekonomi melingkupi sistem kepemilikan, pengaturan dan pengembangan kekayaan. Sedang sebagai ilmu, ekonomi mengacu pada upaya untuk memahami kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala gejala lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya. Yang masuk cakupan ekonomi sebagai ilmu seperti hukum hasil yang berkurang (*law of diminishig returns*), hukum penawaran dan permintaan (*law of supply and demand*), dan lain-lain.

Didasarkan pada pandangan Shadr tersebut, terlihat perbedaan mendasar antara sistem dan ilmu ekonomi. Sistem ekonomi berisikan setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi. Sementara ilmu ekonomi berisikan setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi, terpisah dari ideologi awal dan atau cita-cita kehidupan.

Berdasarkan perspektif tersebut, teori ekonomi yang dipengaruhi oleh doktrin (*system*) suatu masyarakat tertentu belum tentu cocok dengan suatu masyarakat yang memiliki doktrin atau pandangan dunia (*worldview*) yang berbeda. Teori ekonomi pembangunan yang sukses di suatu daerah belum tentu cocok dan sukses di tempat lain, dikarenakan perbedaan pandangan hidup yang berbeda.

Dalam pandangan filsafat ekonomi islam, Pandangan dunia Islam berbeda secara signifikan dari pandangan dunia sekuler. Karena itu, kenyataan,

⁴ Baqir Ash Shadr, M., Buku Induk Ekonomi Islam “Iqtishaduna”, (Jakarta: Zahra, 2008), hal. 80-88.

kebenaran, kebijaksanaan dan tujuan hidup berbeda dari perspektif sekuler dan Islam. Ekonomi Islam dengan aksioma, tujuan (*maqasidi iqtisad*), teori dan kebijakan didorong dari pandangan dunia Tauhidi.

Setelah menguraikan landasan paradigmatis dari pandangan dunia Islam, Aydin (2014)⁵ mengembangkan beberapa aksioma mendefinisikan ekonomi Islam. Pertama, tujuan akhir (tujuan akhir) bagi konsumen bukanlah kesenangan diri sendiri, tetapi kesenangan Tuhan. Kedua, kekayaan bukanlah sarana yang diperlukan, tetapi ketidakpedulian yang lebih disukai untuk memaksimalkan utilitas. Ketiga, keputusan manusia didorong oleh banyak diri, bukan tunggal. Keempat, kita adalah makhluk spiritual dengan pengalaman fisik. Kelima, tidak semua keinginan manusia itu baik. Keenam, kita bisa diramalkan tidak rasional. Bertindak berdasarkan aksioma ini, Aydin mendefinisikan tujuan utama ekonomi Islam (*maqasidi iqtisad*): Pertama, ekonomi Islam bertujuan untuk mengakumulasi modal sosial, moral dan spiritual juga. Kedua, ekonomi Islam membutuhkan filter moral dan spiritual untuk sistem pasar bebas. Ketiga, ekonomi Islam mengekang, alih-alih mempromosikan, konsumsi yang mencolok. Akhirnya, ekonomi Islam bekerja untuk keberhasilan proyek manusia Allah, menawarkan penawar untuk alienasi dan animisasi.

Dalam Islam, Pembangunan ekonomi harus berorientasi pada peningkatan komitmen individu terhadap agamanya. Artinya harus ada korelasi antara pembangunan ekonomi dengan peningkatan pemenuhan kewajiban-kewajiban terhadap agama. Dalam pendekatan pengembangan manusia, memperluas pilihan manusia sesuai dengan kehendaknya berarti memiliki keinginan kehidupan yang lebih baik; tetapi dalam interpretasi pendekatan ini beberapa persyaratan telah disebutkan termasuk: peluang yang sama, keberlanjutan dalam bentuk tanggung jawab untuk generasi masa depan dan produktivitas dalam kerangka investasi SDM.⁶

Hal ini kemudian ditambahkan oleh Abouzhar (2011) bahwa Perkembangan manusia juga terjadi ketika kapasitasnya meningkat sehingga ia dapat mengelola kontradiksi dan konflik internal dan eksternal; dan melangkah maju dalam rute iman dan perbuatan benar serta dalam ruang keadilan luas

⁵ Aydin, N. (2012a), "A grand theory of human nature and happiness", *Humanomics: International Journal of Systems and Ethics*, Vol. 28 No. 1.

⁶ Engineer, M., King, I. and Roy, N. (2008), "The human development index as a criterion for optimal planning", *Indian Growth and Development Review*, Vol. 1 No. 2, pp. 172-92.

untuk mencapai kedekatan dengan Allah dan untuk menggantikan kehidupan alami dengan Hayattan Thayyibah.⁷

Salah satu hal terpenting dalam pembangunan islam adalah keberlangsungan pembangunan itu sendiri bagi generasi selanjutnya dengan memperhatikan alam dan tingkat produksi yang adil dan tidak berlebihan, hal ini biasa disebut dengan Sustainable Development yang pada akhirnya akan memlihara berbagai unsur pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi bukan seperti slogan ekonomi konvensional yang berbunyi “homo economicus” tapi justru terjadinya “homo Islamicus”, yaitu individu yang berperilaku sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Oleh karena itu kegagalan pembangunan di dunia muslim terutama yang memaksakan sistem kapitalisme dan sosialisme sebagai rujukan utama selalu mengalami kegagalan karena pilihan tujuan dan strategi pembangunannya berbeda dengan pandangan hidup yang diajarkan Islam. Sehingga setiap pembahasan tentang pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim, haruslah terlebih dahulu melihat pandangan hidup Islam dan tujuan-tujuannya yang seirama dengan pandangan tadi serta jenis pembangunan yang berkaitan dengannya.

Relevansi Ekonomi Islam Dan Pembangunan

Dalam mengamati pembangunan sudah seharusnya melihat apa yang menjadi landasan dan worldview serta tujuan dan konsep pembangunan itu sendiri, Islam sejatinya memiliki skema yang mencerminkan jatidirinya dalam setiap tindakan, secara umum ekonomi Islam memiliki pondasi yang mencerminkan cara berfikir melalui skema dibawah :



⁷ Abouzar Zangouezhad, Asghar Moshabaki, (2011) "Human resource management based on the index of Islamic human development: The Holy Quran's approach", International Journal of Social Economics, Vol. 38 Issue: 12, pp.962-972

Tujuan Ekonomi Islam sejatinya berasaskan pada nilai nilai yang kompleks dan bermuara pada terwujudnya Maqashid Syariah yang mencerminkan Falah atau kebahagiaan pada setiap pelaku ekonomi di dunia maupun diakhirat.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

201. dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka"[127].

Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fisik tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat. Pada level mikro, falah mengacu kepada pemenuhan kebutuhan dasar, kebebasan dalam bekerja untuk mendapatkan kesenangan spiritual dan materi. Pada level makro, terbentuknya stabilitas dan kesejahteraan ekonomi dengan standrad kehidupan masyarakat dapat tercapai di dunia dan akhirat. Turunan dari konsep falah adalah, distribusi pendapatan yang merata, keadilan ekonomi, berkurangnya kemiskinan dan terbukanya kesempatan kerja. Selain itu, Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.

Terwujudnya tujuan syariah atau Maqashid Syariah yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keterunan dan harta dapat diderivasikan dalam kegiatan amaliyah duniawiyah yang menunjukkan sisi relevansi nya meliputi pembangunan akhlak, spiritual dan kebendaan, sosial dan ekonomi. Manusia sebagai pelaku utama ekonomi memainkan peran penting dalam pandangan islam agar tercapainya kesejahteraan. Representasi Khalifah pada diri manusia merupakan penghargaan atas kontrol yang diberikan oleh yang maha kuasa dalam pengelolaan sumber daya yang ada baik secara individual maupun bersama sama dalam sebuah pemerintahan.

Indikator-indikator pembangunan ekonomi yang didasarkan pada Maqashid Syariah dapat dilihat dari:⁸

1. Pemeliharaan Agama

Jika pokok-pokok ibadah seperti "iman", mengucapkan kalimat syahadat, pelaksanaan sholat, zakat, haji dan lain-lain, adalah sebagai indikator

⁸ Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Bandung: Gunungdjati Press, 2012), hal. 124-138.

bagi terpeliharanya keberadaan agama, maka segala sesuatu yang mutlak dibutuhkan baik materil maupun non materil, sarana barang dan jasa untuk melaksanakan ibadah tersebut harus tersedia dan terealisasi terlebih dahulu. Kebutuhan dasar tersebut antara lain merujuk pada identifikasi kebutuhan berupa sarana, barang dan jasa yang dikemukakan 'Abd Mun'im 'Afar adalah sebagai berikut:⁹

- a) Untuk menjaga kesinambungan iman dan akidah maka setidaknya perlu disediakan antara lain: jasa da'i dan pembimbing ibadah, pencetakan dan penerbitan buku-buku agama termasuk Al-Quran dan Al Hadist, pendirian pusat-pusat pengajian dan bimbingan agama.
- b) Untuk melaksanakan ibadah yang terdiri dari :
 - Sholat: dibutuhkan mesjid dan mushollah, jasa imam dan muadzin, dana-dana waqaf untuk biaya pemeliharaan tempat ibadah, dan penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
 - Zakat: pembentukan struktur kelembagaan zakat yang terintegrasi dan dikelola secara profesional dan transparan, pelatihan manajemen pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat, pemetaan potensi pengumpulan dana zakat dari para muzakki dan pemetaan sebaran mustahiq zakat, penegakan hukum bagi pihak yang tidak mau membayar zakat, pembentukan lembaga yang intens mensosialisasikan kewajiban membayar zakat serta hukum-hukum agamanya.
 - Puasa: lembaga pendidikan yang mengajarkan hukum-hukum puasa, penciptaan lingkungan yang mendukung lancarnya pelaksanaan puasa, menyemarakkan kegiatan keagamaan selama bulan ramadhan.
 - Haji: pembentukan lembaga pengelolaan pelaksanaan haji dan lembaga pengelola dana haji, penyediaan alat transportasi dan penginapan yang nyaman dan lembaga bimbingan haji dan pengajaran manasik haji
- c) Lembaga peradilan: dibutuhkan jasa kepemimpinan kepala negara, majelis permusyawaratan, para hakim, lembaga urusan Islam
- d) Lembaga keamanan: jasa aparat keamanan untuk menjaga keselamatan para pelaksana dakwah, keamanan masyarakat dan negara dan memberikan hukuman bagi para pelanggar aturan-aturan yang berlaku.

⁹ Abdul Mun'im Afar, *al-Tanmiya wa al-Takhfîf wa taqwîn al-masyru'ât fi al-Islâm*, (Jeddah: Dar al-Arabi, 1992), hal. 71

2. Pemeliharaan Akal

Kebutuhan akan pemeliharaan jiwa dan akal meliputi makan dan minum, berpakaian dan bertempat tinggal (kebutuhan akan rumah). Artinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa dan akal manusia, agar dapat menjaga eksistensi hidup serta menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku utama pembangunan (khalifah). Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut adalah merupakan hak dasar dari setiap individu. Pembangunan ekonomi harus menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu sebagai prioritas utama, karena jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi hidup manusia (jiwa).

Pemeliharaan keselamatan jiwa menurut Afar¹⁰ meliputi sembilan bidang pokok:

- a. Makanan: makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, lauk-pauk beserta bumbu bumbu, air bersih dan garam.
 - b. Perangkat perlengkapan untuk pemeliharaan badan
 - c. Pakaian
 - d. Perumahan
 - e. Pemeliharaan kesehatan: ketersediaan rumah sakit, peralatan sakit, obat-obat, dokter, ambulans, dan lain-lain
 - f. Transportasi dan telekomunikasi: alat transportasi darat, laut dan udara dan alatalat komunikasi
 - g. Keamanan: jasa keamanan bagi individu dan masyarakat
 - h. Lapangan pekerjaan: pekerjaan yang halal dan manusiawi, upah yang adil, dan kondisi kerja yang nyaman
 - i. Lindungan sosial: lembaga pemeliharaan lanjut usia, anak yatim piatu, bantuan bagi para penganggur dan jaminan sosial.
- Pemeliharaan akal dapat terdiri dari:

- Pendidikan: penyediaan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, biaya pendidikan yang rendah bahkan gratis, penyediaan alokasi dana yang tinggi untuk sektor pendidikan, penyediaan sarana pendidikan yang memadai termasuk guru dan tenaga pengajar.
- Penerangan dan kebudayaan
- Penelitian Ilmiah : : pusat pengembangan kurikulum, pusat pengembangan ilmu modern, pusat penelitian, dan lain-lain.

Indikator kesuksesan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar untuk memelihara jiwa dan akal manusia. Semua

¹⁰ *Ibid.*, hal. 73

elemen-elemen penunjang dari pemeliharaan jiwa dan akal adalah mutlak disediakan.

3. Pemeliharaan Keturunan Dan Harta

Tidak ada peradaban yang mampu bertahan jika generasi mudanya memiliki kualitas spiritual, fisik dan mental yang rendah, sehingga berdampak pada ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin dinamis. Oleh kerennya mesti dilakukan perbaikan secara terencana dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas generasi muda. Salah satu langkah untuk memperbaiki karakter dan keperibadian mereka adalah dengan menanamkan akhlak baik (khuluq hasan) melalui proses tarbiyah di keluarga dan lembaga pendidikan. Sementara harta merupakan fasilitas yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk menunjang fungsi utamanya sebagai khalifah di bumi. Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta dituntut untuk didasarkan pada nilai-nilai Islam. Harus ada filter moral dalam pengelolaannya.¹¹

Untuk menjaga keselamatan keturunan dan harta maka dibutuhkan lembaga-lembaga yang terkait dengan¹² :

a) Pemeliharaan keturunan

- Lembaga pernikahan: mempermudah legalitas pernikahan, pembelakan pra pernikahan, pembinaan rumah tangga paska pernikahan, dan lain-lain
- Pusat pembinaan ibu-ibu berkenaan dengan kesehatan, psikologi, dan makanan, pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan janin
- Pemeliharaan anak-anak: bimbingan dan pendidikan kesehatan bagi anak-anak, lembaga pengasuhan anak, program dasar untuk kesehatan dan nutrisi anak, penanaman akidah yang benar dan prinsip-prinsip dasar agama Islam, memberikan bekal keahlian bagi anak-anak kurang mampu
- anak yatim: pusat pemeliharaan anak-anak yatim

b) Pemeliharaan harta

- Pembentukan lembaga keuangan dan investasi

¹¹ Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, edisi terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 259

¹² Abdul Mun'im Afar, al-Tanmiya wa al-Takhtit wa taqwîn al-masyruatt fi al-Islam, hlm. 76

- Strategi keuangan akurat untuk pembangunan dan pemeliharaan harta
- Pengamanan pemeliharaan harta dengan penerapan hukuman atas pencuri, perampas harta dan pelaku kecurangan, pelarangan riba, sogok dan korupsi
- Menjamin keamanan harta dan kepemilikan pribadi, pengaturan akad transaksi seperti jual beli, perkongsian, sewa, dan lain-lain
- Pengajaran berkenaan dengan tata cara mendapatkan harta dan pengembangannya, sumber-sumber pendapatan halal dan haram, hukum-hukum transaksi, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan; kebutuhan yang dimaksud mencakup segala macam barang dan jasa primer, sebagai sarana yang harus dihasilkan dalam proses pembangunan dengan perencanaan yang tepat disertai anggaran yang memadai.

Oleh karena, pembangunan berbasisi maqashid syari'ah adalah pembangunan yang meletakkan prioritas utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia demi terpeliharanya lima mashlahat pokok (agama, akal, jiwa, keturunan dan harta) melalui usaha dalam proses produksi atau pembangunan ekonomi.

Terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu akan berkorelasi pada peningkatan kesejahteraan atau tercipta kesejahteraan. Dan sebaliknya apabila manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, ia akan merasakan ketidakpuasan, tidak damai, tidak senang, tidak bahagia, tidak aman. Kondisi ini adalah kondisi tidak sejahtera. Ketidakadaan kesejahteraan akan berdampak pada terganggunya lima masalah pokok. Oleh karenanya Al-Ghazali mengungkapkan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk mendorong kemaslahatan (kesejahteraan) manusia yang mana terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan. Selanjutnya, segala sesuatu yang melindungi lima unsur kepentingan publik tersebut maka dianjurkan dilakukan dan sebaliknya, segala sesuatu yang mengancamnya adalah harus dihilangkan.¹³

Sejalan dengan Pramuwito¹⁴ yang mengkategorikan kondisi sejahtera jika apabila kebutuhan jasmaninya terpenuhi yang meliputi: bebas dari kelaparan, kekurangan akan pakaian, kekurangan akan perumahan, air dan

¹³ Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid shariah* (Jedah: ITIE Book, 2008), hal. 7.

¹⁴ C. Pramuwito, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Depsos RI, 1996), hal. 20.

udara; terjaminnya kesehatannya, tidak mengalami kesulitan dalam menjaga kesehatan dengan terjaminnya fasilitas-fasilitas kesehatan; dan kebutuhan rohaninya yang bebas dari rasa takut, cemas dan terancam. Terpenuhinya kebutuhan sosial, termasuk bebas dari berbagai ancaman dan kehidupan masyarakat yang tenteram dan harmonis. Dengan demikian terdapat hubungan antara pembangunan ekonomi yang berbasis Maqashid Syariah dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia, dan juga hubungannya dengan kondisi kesejahteraan, yang bila disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah merupakan predisposisi dari kesejahteraan, dalam arti kesejahteraan sosial akan ditentukan oleh bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar warganya.

Berdasarkan hal itu maka dalam perencanaan dan proses pembangunan harus memprioritaskan sektor yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar agar dapat menjadi lima mashlahat pokok. Sedangkan sektor-sektor produksi yang terkait dengan kebutuhan sekunder yang tidak terkait dengan eksistensi hidup manusia, dilakukan pada tahap berikutnya ketika segala kebutuhan pokok setiap individu telah terpenuhi. Namun perlu dicatat di sini bahwa kebutuhan harus dilihat secara dinamis, tingkatannya akan berubah secara dinamis seiring dengan perubahan kondisi ekonomi masyarakat secara umum. Jika standar hidup rata-rata individu dalam suatu masyarakat berubah, maka otomatis standar dan tingkatan kebutuhan pun akan mengalami perubahan.

KESIMPULAN

Kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negaranegara Barat sekuler mendorong sebagian negara-negara Muslim—masuk kategori negara berkembang menjadikannya sebagai kiblat model dalam mendesain pembangunan ekonominya. Model-model pembangunan yang sukses dikembangkan di negara-negara maju dianggap sebagai pengalaman empiris yang bisa diduplikasi dan diterapkan di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara Muslim. Model pembangunan itu dianggap bersifat universal dan kompatibel untuk diterapkan di segala ruang dan waktu meskipun itu berbeda dengan ruang dan waktu di mana model itu berkembang pada awal mulanya. Atas dasar asumsi inilah kemudian studi ilmu ekonomi pembangunan yang menjadikan pembangunan ekonomi sebagai kajian utamanya mulai dipelajari dan diterapkan di negara-negara berkembang, tidak terkecuali negara-negara Muslim.

Namun, model dan pengalaman empiris yang berkembang di dunia Barat tidak serta merta bisa diterapkan dan sukses di dunia Muslim, hal ini disebabkan perbedaan kultur-budaya, nilai-nilai, pandangan hidup dan ideologi yang berbeda. Teori dan model pembangunan yang diterapkan di dunia Barat

sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sekularisme, liberalisme dan kapitalisme yang sudah menjadi worldview sebagian besar masyarakat Barat. Sementara dunia Muslim justru menjadikan agama sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi, seperti menekankan pandangan “Sustainable Development” sebagai poros pembangunan yang berkelanjutan hal ini tentu berbeda dengan kapitalisme yang dipengaruhi sistem liberalis yang memaknai produksi dan pertumbuhan harus dibuat sebesar besarnya dengan tanpa melihat efek yang ditimbulkan dan keberlangsungan sumber daya alam yang ada. hal ini tidak heran karena filosofi dan cara pandang hidup yang berbeda antara sistem islam dan kapitalisme. Adanya perbedaan pandangan hidup ini akan menyebabkan terjadinya chaos jika sistem dan pembangunan ekonomi tersebut dipaksakan untuk diterapkan di dunia Muslim, sebagaimana sudah terjadi di beberapa negara Muslim belakangan ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan antara model pembangunan yang diterapkan di dunia Barat dan dunia Muslim selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dan tujuan dari ajaran Islam (maqashid syari’ah).

Karenanya pembangunan ekonomi yang seharusnya diterapkan di dunia Muslim harus berbasis pada maqashid syari’ah yaitu terciptanya keadilan distributisi melalui terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar manusia agar dapat menjaga kemaslahatan kehidupan manusia. Pembangunan ekonomi menjadikan manusia sebagai pelaku dan objek utama dari pembangunan itu sendiri seiring fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Pembangunan ekonomi harus menjaga dan melestarikan lima unsur pokok penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagai asas keberlangsungan pertumbuhan ekonomi atau “Sustainable Development”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun’im Afar, al-Tanmiya wa al-Takhtit wa Taqwin Al-Masyruat fil Islam, (Jeddah: Dar al-Arabi, 1992).
- Ali Rama Dan Makhilani. 2013. Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah. Jurnal Dialog Vol. 36, No.1.
- Baqir Ash Shadr, M., Buku Induk Ekonomi Islam “Iqtishaduna”, edisi terjemahan, (Jakarta: Zahra, 2008).
- C. Pramuwito, Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: Depsos RI, 1996)
- Saifullah, Ekonomi Pembangunan Islam, (Bandung: Gunungdjati Press, 2012).
- Umar Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, edisi terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2000).

- Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid shariah* (Jedah: ITIE Book, 2008.)
- Aydin, N. (2012), "A grand theory of human nature and happiness", *Humanomics: International Journal of Systems and Ethics*, Vol. 28 No. 1.
- Necati Aydin (2015) "Social business for sustainable development and subjective wellbeing". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 8 Issue: 4, pp.491-507
- Abouzar Zangouezhad, Asghar Moshabaki, (2011) "Human resource management based on the index of Islamic human development: The Holy Quran's approach", *International Journal of Social Economics*, Vol. 38 Issue: 12, pp.962-972
- Engineer, M., King, I. and Roy, N. (2008), "The human development index as a criterion for optimal planning", *Indian Growth and Development Review*, Vol. 1 No. 2, pp. 172-92.
- Budiman Ginting, Rosnidar Sembiring, Mahmud Siregar, Afrita Abduh (2017). "The Role of Law in Economic Development: To Develop a Special Economic Zone in Order to Build a National and Regional Economy" (Proceedings)